



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 809/IV/2014

I/APRIL 2014



## DPR Siap Bantu Karyawan PT Newmont

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA APRIL 2014

Minggu Pertama bulan April diisi dengan kegiatan Ketua DPR, yaitu melakukan pengambilan sumpah dua anggota DPR PAW tanggal 25 Maret 2014. Kemudian menerima delegasi Serikat Pekerja PT Newmont Nusa Tenggara dan memberikan kuliah tamu di hadapan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 22 Maret 2014.

## Penggantian Antar Waktu (PAW) Dua Anggota DPR

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014. Kedua anggota yang mengucapkan sumpah adalah; (1) RR.Ida Resmi Nurani sebagai anggota DPR mewakili PDIP Dapil Jawa Tengah VII, menggantikan Ganjar Pranowo SH atas dasar Keppres No.18./P tahun 2014, (2) drg. Hj.Rini Rahmadhani sebagai anggota DPR mewakili Partai Golkar Dapil Riau I, menggantikan Ir.H.Arsyad Juliandi Rachman M.B.A atas dasar Keppres No.17/p tahun 2014.

## Menerima Delegasi Serikat Pekerja PT Newmont

Ketua DPR RI didampingi oleh Pimpinan Fraksi PKS, Fachri Hamzah. Dalam pertemuan, dua serikat pekerja, yaitu serikat pekerja kimia, energi

dan pertambangan SPSI serta Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Tambang Samawa PT Newmont menyampaikan point-point aspirasi pekerja.

Pertama; Bahwa sejak berlakunya penerapan UU No.24 tahun 2009 tentang Minerba serta turunan nya, yakni PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No.06 tahun 2014 tentang Biaya Keluar Progressif dan Permen No.01 tahun 2014 yang menghendaki adanya proses pemurnian dalam negeri terhadap hasil pertambangan, ternyata berimbas terhadap pekerja secara menyeluruh, termasuk pekerja yang berada di PT Newmont Nusa Tenggara.

Kedua; Serikat Pekerja memberikan sikap mendukung pemberlakuan UU Minerba No.4 tahun 2009 dan mendukung agar PT Newmont Nusa Tenggara agar tetap beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga; menyampaikan kepada DPR dan Pemerintah

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



untuk dapat merevisi UU serta Peraturan Pemerintah yang dapat mengancam kelangsungan hidup pekerja. Keempat; menuntut agar peraturan Menteri Keuangan tentang biaya keluar progressif direvisi, karena berdampak terhadap hilangnya pekerjaan dan berpotensi memutus rantai ekonomi pekerja dan keluarganya.

Kelima; meminta DPR dan Pemerintah agar dapat menjamin terselesaikannya persoalan Pemerintah dengan PT Newmont Nusa Tenggara Barat, agar pekerja dapat hidup dengan tenang tanpa kecemasan yang berkepanjangan. Keenam; menolak PHK dan upaya-upaya PHK yang akan dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Ketujuh; mendorong terciptanya keberlangsungan operasional perusahaan dengan memastikan pekerja tetap bekerja dengan aman, tepat dan selamat.

Delegasi juga meminta agar DPR RI dapat melakukan langkah-langkah terobosan menghadapi usulan dari para pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja.

Menyikapi usulan para pekerja, Ketua DPR mengatakan bahwa UU Minerba ini juga telah dicermati oleh kalangan Dewan dan sikap Dewan adalah agar UU tersebut tetap diberlakukan. Adapun persoalan yang terjadi dilapangan, adalah dampak dari implementasi adanya Peraturan Menteri yang membawa kekhawatiran para pekerja tentang PHK. Ketua menjanjikan bahwa masalah ini akan dibahas dalam rapat Pimpinan lebih dahulu, untuk kemudian ditindak lanjuti atas dasar Keputusan Rapim. Hal ini terkait masa reses anggota DPR RI yang sedang berlangsung hingga minggu pertama Mei 2014. Kalangan DPR sangat memahami isi UU, karena pembahasan UU tersebut dilakukan antara DPR dan Pemerintah. Harapan DPR RI adalah, bahwa

setelah aturan tersebut diundangkan, maka sebaiknya Pemerintah perlu bersiap sejak dini dan jangan menunggu hingga lima tahun untuk membuat aturan turunan dari UU.

### Kuliah Tamu di UMM

Pada sesi kuliah tamu yang disampaikan oleh Ketua DPR RI di UMM, menyeru agar mahasiswa jangan sampai membenci partai politik karena parpol merupakan salah satu pilar demokrasi. Lebih lanjut Ketua DPR menyatakan bahwa parpol mempunyai peranan penting dalam sistem demokrasi. Banyaknya masalah yang dihadapi parpol menunjukkan bahwa sistem yang ada harus diperbaiki. Lingkungan kampus dihimbau agar mengerti dan paham politik, tapi bukan berpolitik praktis. Dalam kuliah tamu ini, Ketua DPR mengurai bahwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, baik ditingkat nasional maupun lokal, merupakan hal yang lumrah, sebagai konsekuensi perpindahan dari negara otoriter menuju negara demokratis.

Tesis Lord Acton, *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*, diamini oleh Ketua DPR. Kekuasaan memang mendorong seseorang berperilaku korup. Dalam lawatan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Ketua DPR menyatakan bahwa sekarang ini perilaku korup juga banyak terjadi ditingkat lokal, mulai dari Gubernur hingga Bupati. Namun, ini adalah fase demokrasi yang harus dijalani oleh masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Ketua mengatakan bahwa parpol yang menjadi salah satu pilar demokrasi, memang perlu dikawal. Mahasiswa diminta agar jangan membenci parpol, karena dari situlah lahir para pemimpin bangsa, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota hingga DPR. Karenanya, Ketua DPR mendorong agar mahasiswa berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2014 dan tidak antipati. Jika mahasiswa ingin mengkritik, sebaiknya mengkritik dengan rasional dan bukan emosional. Hal ini mengingat bahwa mahasiswa, sebagai generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan para pemimpin saat ini. \*\*\*

## DPR Siap Bantu Karyawan PT Newmont



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Anggota Komisi III Fakhri Hamzah menerima Serikat pekerja PT. Newmont Nusa Tenggara.

Serikat pekerja PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang beroperasi di Sumbawa, NTB, menemui Ketua DPR RI Marzuki Alie untuk mengadukan bencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami para karyawan. Ada kegelisahan dan kegamangan yang mendera para karyawan.

Delegasi karyawan yang diwakili sekitar 10 orang dari Serikat Pekerja Samawa PT NNT, didampingi Fakhri Hamzah Anggota Komisi III DPR dari F-PKS diterima Marzuki Alie di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Selasa (25/3). Kegelisahan para karyawan berawal dari lahirnya UU No.4/2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang diikuti terbitnya Peraturan Menkeu No.6/PMK.011/2014 yang mengatur tentang pajak progresif terhadap perusahaan tambang terutama yang dikuasai asing.

Dengan alasan tingginya pajak yang diterapkan pemerintah, PT NNT melakukan PHK besar-besaran kepada para karyawan. Padahal, banyak karyawan dan juga masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya pada PT NNT tersebut. Iwan Setiawan Ketua Serikat Pekerja Tambang Samawa, menjelaskan, PT NNT sudah mengurangi kegiatan

produksi. Tak ada penjualan konsentrat di kuartal pertama. Dan bila pemerintah tidak member kelonggaran bea keluar, dipastikan perusahaan akan tutup. Dampaknya, karyawan pun di PHK.

Marzuki Alie yang mendengarkan langsung keluh kesah para karyawan PT NNT, mengatakan, akan segera berkirim surat ke pihak-pihak terkait di pemerintahan agar kegelisahan karyawan bisa segera hilang dan penghidupan masyarakat setempat tetap berlangsung. Hanya saja, Marzuki menyayangkan masyarakat kerap tidak peduli bila ada sosialisasi atas produk UU baru yang dihasilkan DPR. Bila masyarakat menyimak betul setiap sosialisasi mungkin tidak akan gelisah dan gamang seperti yang dihadapi sekarang.

“Saya sosialisasikan sekuat tenaga keliling Indonesia, tapi

masyarakat tidak peduli, termasuk UU Minerba,” ungkap Marzuki. Soal pajak progresif ini memang bersifat memaksa untuk perusahaan-perusahaan besar asing yang bergerak di bidang pertambangan. Tapi, jangan karena penerapan pajak progresif, lalu rakyat dikorbankan. Mungkin perusahaan asing tersebut sengaja menakut-nakuti karyawan dengan ancaman PHK, agar kebijakan pajak progresif bisa dilunakkan.

Fakhri Hamzah dalam kesempatan yang sama menyarankan, agar ada jalan tengah yang cepat dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan dari ancaman PHK besar-besaran. Pemerintah, kata Fakhri, tak perlu takut mengeluarkan kebijakan baru. Masalah ini jangan terus berada di ruang abu-abu terlalu lama. (mh) foto: iwan armanias/parle.

## Komisi VIII Nilai Penanganan Bencana Kelud Cukup Baik

Komisi VIII DPR RI menilai upaya pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cukup baik dalam menangani korban bencana erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur. Kesimpulan ini diperoleh setelah peninjauan langsung ke lokasi bencana dan berdialog langsung dengan korban.

“Kita datang ingin memastikan Kemensos dan BNPB telah melaksanakan tugasnya dalam konteks kebencanaan dalam hal ini musibah yang dialami oleh warga masyarakat yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Kelud,” kata Ketua Komisi VIII Ida Fauziah disela peninjauan Pos Korban Bencana Erupsi Gunung Kelud di Kecamatan Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur, belum lama ini.

Bersama tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII ia juga menerima laporan dari Wakil Bupati Kediri yang dinilai dapat membangun koordinasi yang baik dengan tim dari pusat. “Alhamdulillah kami melihatnya ada kesiagaan atau kesiapsiagaan yang luar biasa, baik dari pemerintah daerahnya maupun dari masyarakatnya,” lanjut politisi Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.

Dalam kesempatan berdialog dengan masyarakat di lokasi pengungsian, seorang warga Romiyasih mengutarakan rumahnya yang rusak berat terkena lahar dingin dan perlu perbaikan segera. Ia berharap DPR dapat memfasilitasi renovasi segera setelah memungkinkan. “Tidak usah sekaligus tapi boleh pelan-pelan agar kami semua dapat kembali ke rumah masing-masing, dan pajak pembangunan atau pajak tanah agar dapat dibebaskan,” ungkapnya terbata.

Ida Fauziah yang juga datang dalam kapasitasnya selaku Ketua Panitia Kerja Bantuan Siswa Miskin (Panja BSM) menjelaskan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan maupun berat sedang dalam proses pendataan. Penanganannya menjadi tanggungjawab bersama



Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI meninjau korban erupsi Gunung Kelud.

antara pemerintah kabupaten yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan BNPB. “Nanti semuanya akan urunan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Kelud,” jelasnya.

Proses pendataan menurutnya sudah dibicarakan dalam rapat koordinasi antara BNPB dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan setelah pendataan selesai, segera diproses dan berikutnya pemberian bantuan kepada warga masyarakat. “Yang penting warga masyarakat Kediri mendapatkan kesabaran, kita ambil hikmahnya saja,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Jatim VIII ini.

Dalam pertemuan dengan itu Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII juga berupaya menghibur anak-anak yang berada di lokasi pengungsian. Mereka diajak bernyanyi, menguji kebiasaan mereka dalam menghafal surah pendek Al Quran. “Ayo siapa yang berani maju dapat hadiah dari ibu dan bapak anggota DPR,” seru seorang panitia setempat. Sejumlah anak berebut mengacungkan tangan. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

## Komisi VIII DPR Dukung Alih Status STAIN

Komisi VIII DPR RI mendukung perubahan status STAIN menjadi IAIN dan dari IAIN menjadi UIN. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Syaed Fuad Zakaria (F-PG) selaku Ketua Tim Panja PTAI saat pertemuan dengan Kakanwil Agama, Rektor dan Pengurus STAIN Syaikh AbdulRahman Siddik, dan para Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta Provinsi Bangka Belitung dalam kunjungan kerja spesifik Panja Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Komisi VIII, belum lama ini.

“Peningkatan status ini, berdasarkan pengalaman, berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di PTAI dan juga menghasilkan output yang berkualitas,” kata Syaed.

Untuk itu, tegas Syaed, perlu dilakukan peningkatan kualitas dosen dan pengembangan serta penguatan kelembagaan. Jika tidak, PTAI akan kurang diperhatikan dan menempati kelas bawah dalam konstelasi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu tantangan PTAI ke depan adalah globalisasi pendidikan tinggi.

Menurutnya, pada tahun 2014, tantangan perguruan tinggi adalah bagaimana perguruan tinggi harus hidup di tengah dunia kompetisi global yang semakin nyata. Oleh karena itu, PTAI harus mempersiapkan diri baik secara administratif maupun akademis agar mampu berkompetisi secara nasional dan internasional.



Tim Panja PTAI Komisi VIII DPR RI mengunjungi STAIN Syaikh AbdulRahman Siddik, Babel.

Ketua STAIN SAS Kepulauan Babel, Zayadi mengatakan sebenarnya STAIN SAS ini sedang melakukan kegiatan program besar yaitu alih status STAIN SAS menjadi IAIN. Kalau persyaratan Kemenag menetapkan mahasiswa harus berjumlah 3.000 orang, pada semester depan menerima 600 mahasiswa, maka jumlahnya sudah lebih dari 3.000 orang. “Oleh sebab itu dari segi kemahasiswaan kita telah mencukupi,” jelasnya.

Saat ini mahasiswa STAIN SAS masih sangat terbatas, berjumlah 2.700 mahasiswa yang dibimbing oleh 41 dosen, dan pegawai sekitar 30-an orang. Melihat rasionalitas atau rasio antara bimbingan dosen itu dengan mahasiswa hanya memiliki separuh dari dosen secara ideal. Artinya STAIN SAS ini masih membutuhkan dosen

secara ideal 40 lebih tenaga pengajar dan tenaga administrasi. Karena STAIN SAS ini berawal dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah kemudian diresmikan menjadi STAIN SAS tahun 2004 atas inisiatif para tokoh masyarakat dan tokoh akademi di lingkungan Provinsi Babel.

Jadi, sambung dia, dalam rangka alih status ini kalau di Kemenag “Insya Allah” tidak banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh STAIN SAS. Tetapi ini perlu juga dukungan politik dari DPR RI terutama dalam masalah anggaran, dan bagaimana mensukseskan alih status STAIN SAS ini menjadi IAIN. “Kita menargetkan paling lambat tahun 2016, STAIN SAS sudah beralih status menjadi IAIN,” tambahnya. (iw/ foto:iwan armanias/parle.

## Pansus RUU Panas Bumi DPR Himpun Masukan Dari Pemda NTB

Pansus RUU tentang Panas Bumi segera memperdalam dan membahas lebih detail beberapa permasalahan krusial mengenai pengaturan yang mendasari perubahan UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Permasalahan yang mendasari perubahan UU tersebut antara lain pengaturan mengenai ketentuan peralihan yang

lebih tegas untuk jangka waktu dan masa berlaku Wilayah Kerja Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya UU No.27 Tahun 2003. Dimana pengelolaannya dalam bentuk kontrak operasi bersama, kuasa perusahaan, dan izin perusahaan panas bumi.

“Dalam UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi belum



Wakil Ketua Pansus RUU Panas Bumi Satya Widya Yudha memberikan cinderamata kepada asisten Gubernur NTB Bidang Perekonomian Pembangunan.

secara komprehensif mengatur perusahaan panas bumi di Indonesia, sehingga diperlukan suatu penyempurnaan guna memecahkan permasalahan perusahaan panas bumi,” ujar Wakil Ketua Pansus RUU Panas Bumi Satya Widya Yudha (F-PG) saat pertemuan dengan Gubernur NTB, DPRD NTB, Bupati Dompu, Dinas ESDM NTB, Dinas Kehutanan NTB, dan PT. Pacific Geo Energy, belum lama ini.

Politisi dari Partai Golkar ini menyadari, bahwa draft RUU

yang ada belumlah sempurna. RUU ini telah diupayakan untuk disusun sebaik-baiknya dengan memperhatikan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. “Masukan, saran, dan usulan ini nantinya akan digunakan oleh anggota Pansus RUU Panas Bumi dan pemerintah untuk penyempurnaan atas RUU dimaksud,” kata Satya

Dia mengharapkan pemikiran, saran maupun usulan untuk melengkapi dan menyempurnakan RUU ini, sehingga apabila telah disahkan sebagai UU dapat menjadi perangkat peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dalam kegiatan panas bumi di Indonesia.

Sementara Gubernur Provinsi NTB yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lalu Gita Ariadi mengatakan, Pemda NTB berupaya bagaimana memajukan pembangunan, mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Oleh karenanya RUU Panas Bumi yang diformulasi sedemikian rupa suasana kebathinannya sudah mewakili aspirasi NTB.

Dengan adanya RUU Panas Bumi ini dia berharap, potensi-potensi yang ada di NTB bisa dikembangkan dan dioptimalkan lebih lanjut, dan bisa memberikan manfaat kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB.

Dalam pertemuan ini Satya juga didampingi anggota Pansus RUU Panas Bumi, antara lain I Wayan Gunastra, Irvan-syah, Tommy Adrian Firman, dan Muhammad Syarifrudin. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

## Babak Baru Kerjasama AIPA-Jerman

DPR RI menjadi tuan rumah penandatanganan kerjasama antara AIPA (Asian Interparliamentary Assembly) dengan Pemerintah Jerman, Selasa (25/3). Penandatanganan dilakukan oleh Sekjen AIPA, Mr. Periowsamy Otharam, JP dan Dubes Jerman, George Witschel sebagai wakil dari pemerintah Jerman dengan disaksikan Sekjen DPR RI, Winantuningtyas-titi dan beberapa perwakilan anggota AIPA lainnya.

Kerjasama sebagai fase pertama kerjasama AIPA dengan Pemerintah Jerman ini dilakukan melalui GIZ dan Hanns Seidel Foundation. Namun sebenarnya pada tahun 2012-2013 kedua belah pihak telah melakukan kerjasama dengan *Pilot Project* berbentuk *technical assistant* diantaranya tentang *budget and transparency of parliamentary* dan *AIPA capacity development*.

“Kerjasama ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak tentunya.



Foto bersama usai penandatanganan kerjasama AIPA-Jerman.

Namun bagi AIPA sendiri kerjasama ini selain menjalin hubungan baik antara anggota AIPA dengan pemerintah Jerman juga akan bermanfaat untuk

terus meningkatkan kemampuan di segala bidang, misalnya dengan *training, workshop* dalam bentuk *technical assistant*,” jelas Sekjen AIPA, Mr. Periow-

samy Otharam, JP kepada Parle.

Setelah penandatanganan ini sejumlah program telah disusun, diantaranya *training* dan *workshop* yang membahas SOP AIPA, Intranet AIPA, *women rights* (hak asasi wanita), *training* dan *study* lainnya oleh seluruh parlemen anggota Asean.

Sementara itu bagi Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, adanya Kantor Sekjen AIPA di Indonesia menjadi sebuah kepercayaan tersendiri kepada DPR RI dan bangsa Indonesia pada umumnya. Karena sebenarnya tidak hanya Indonesia yang menginginkan keberadaan Kantor sekretariat AIPA di

negaranya.

Dalam statuta tercantum bahwa negara yang dipercaya menjadi Kantor Sekretariat AIPA harus memfasilitasi sebaik-baiknya kebutuhan kerja seluruh AIPA. Hal tersebut diungkapkan Win, begitu ia biasa disapa, sebagai sebuah bentuk dukungan Indonesia terhadap AIPA. Dan bagi Indonesia sendiri banyak manfaat yang bisa dipetik dengan keberadaan Kantor Sekretariat AIPA di Indonesia. Salah satunya dengan keterlibatan Indonesia ke dalam program-program AIPA itu sendiri.

“Ini sebagai bentuk dukungan In-

donesia kepada AIPA, selain tentunya sebuah kepercayaan tersendiri dari AIPA terhadap Indonesia. Karena bukan hanya Indonesia saja yang ingin memfasilitasi kantor Sekretariat AIPA, tetapi juga negara-negara lainnya. Di sisi lain dengan keberadaan Kantor Sekjen AIPA di Indonesia memberi banyak manfaat, setidaknya kita bisa masuk ke dalam program-program AIPA, seperti halnya penandatanganan kerjasama AIPA dengan Jerman ini. Kita bisa terlibat dan memanfaatkan program-program di dalamnya. *Capacity building* misalnya,” kata Win. (Ayu) *foto: eka hindra/parle.*

## Ketua DPR Terima Dubes Oman

Hubungan Indonesia dan Oman menjadi topik pembicaraan utama antara Ketua DPR RI Marzuki Alie dengan Duta Besar Oman untuk Indonesia Al Sayyid Nazar Al Julanda Al Said. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPR, Gedung Nusantara III, Selasa (25/03).

“Dubes Oman ini pertama kalinya datang ke DPR. Beliau berharap hubungan kedua negara semakin baik dan meningkat. Karena kita mempunyai basis sosial dan budaya yang relatif sama. Oman merupakan negara Islam, sedangkan Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Mudah-mudahan Dubes yang baru ini dapat meningkatkan hubungan Indonesia dengan Oman,” harap Marzuki, usai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Al Sayyid menyebutkan saat ini sedikitnya 30 ribu Tenaga Kerja Indonesia bekerja di Oman. Ia menyatakan, pihaknya berusaha untuk memperlakukan TKI dengan baik.

“Dengan para TKI, masyarakat Oman memberikan perlakuan yang sangat baik. Dan tidak ada hal-hal yang menimbulkan masalah di antara kedua negara. Dubes Oman juga



Ketua DPR RI Marzuki Alie berdialog dengan Duta Besar Oman.

berharap, Indonesia dapat mengirim TKI yang profesional, dan mengurangi TKI *unskill* yang sudah bekerja di sana,” jelas Marzuki.

Dalam kesempatan itu, Sayyid juga menyampaikan harapannya untuk Indonesia yang akan menghadapi pemilu, agar berjalan lancar dan aman. (sf) *foto: andri/parle/iw.*



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

## Kampanye Terbuka Dengan Hamburkan Dana Besar Tidak Efektif

Ketua DPR Marzuki Alie menilai, kampanye pemilu sekarang ini tidak lagi bermewah-mewah atau menghabiskan dana yang besar. Pasalnya kampanye dengan mengumpulkan masa dalam jumlah besar termasuk

membagi uang transport, tidak efektif karena masyarakat sudah cerdas.

Dalam perbincangannya dengan pers usai melantik dua anggota DPR pengganti antar waktu (PAW), Selasa

(25/3), Marzuki menyatakan, yang diharapkan masyarakat adalah pertemuan dialogis, diskusi dan bila caleg mampu berkomunikasi dengan baik, justru ini yang akan menarik masyarakat.

Terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan sejumlah parpol, Pimpinan Partai Demokrat ini mengatakan, setiap peraturan ada potensi terjadinya pelanggaran. “Kalau nggak ada aturan, nggak ada pelanggaran, namun demikian hukum harus ditegak-

kan. Aturan itu dibuat kadang-kadang karena adanya pelanggaran,” kilahnya.

Mengomentari rapat pleno KPU yang menetapkan DPT, Pimpinan DPR ini melihat sudah relatif bagus. Selisih antara data KPU dan Kemendagri sudah sedikit sekali. Pada akhirnya masyarakat akan dapat menerima itu termasuk para peserta pemilu, karena belum tentu data yang tercantum di Kemendagri telah mencakup semua penduduk termasuk para tuna wisma yang tinggal di bawah jembatan. Se-

mentara KPU mencoba memberikan hak konstitusi kepada mereka.

Yang penting, lanjutnya, laksanakan kegiatan sesuai tahapan dan tidak terjadi kekosongan lembaga negara pada saatnya. Misalnya anggota DPR mau dilantik belum ada SK-nya, jangan sampai nanti Presiden mengakhiri tugasnya belum ada Presiden baru. “Harusnya itu dipenuhi, itu yang paling penting,” kata Marzuki menambahkan. (mp) foto: andri/parle/iw.

## Ketua DPR Lantik Dua Anggota PAW

Ketua DPR Marzuki Alie, di VIP Operation Room Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3) melantik dua anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW). Kedua anggota DPR tersebut adalah Rini Rahmadani menggantikan Arsyadjuliandi Rachman dari Fraksi Partai Golkar, dan RR. Ida Resmi Nurani menggantikan Ganjar Pranowo dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ketua DPR saat memandu pengucapan sumpah kedua anggota DPR tersebut menekankan, agar anggota Dewan bisa bekerja sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Selain itu Ketua DPR berharap anggota DPR memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan RI.

Seusai pelantikan dan ucapan selamat kepada anggota DPR baru tersebut, Ketua DPR mengharapkan segera bekerja dan membantu menyelesaikan PR yang masih tertinggal, seperti beberapa RUU dan tugas konstitusional lainnya.



Dua Anggota PAW dilantik Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Sementara anggota baru Rini Ramadhani mengatakan akan menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya meski masa tugasnya hanya 6 bulan hingga pelantikan anggota DPR baru pada 1 Oktober 2014. Dia menyatakan siap ditempatkan di Komisi manapun, tetapi sesuai dengan pendidikannya, bisa ditempatkan sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan keluarga berencana. (mp) foto: odjie/parle/iw.

## Kalbar Harus Siapkan Program PPB

Kalimantan Barat memang termasuk daerah aman erupsi Gunung berapi, namun menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah tetap harus disiapkan program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (PPB). Sehingga jika bencana datang, maka akan langsung dapat dilakukan penanganan serta dapat diminimalisir kerugian dan korban.

Hal tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya beberapa waktu yang lalu.

“Walaupun Kalbar termasuk daerah yang tidak memiliki gunung berapi, namun tetap harus dilakukan program penanggulangan bencana sebagai antisipasinya. Karena

bencana tidak hanya berasal dari erupsi gunung berapi saja, tetapi ada juga bencana-bencana yang berasal dari ulah manusia itu sendiri. Sejauh ini apa saja program yang telah disusun Pemrov. Kalbar dan apa hambatannya selama ini,” tanya Ida.

Menjawab hal tersebut, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan bahwa Kalimantan Barat memang tidak ada gunung berapi, tetapi bukan berarti bebas dari bencana. Ada beberapa bencana yang masih sering terjadi di daerahnya. Diantaranya adalah banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan yang asapnya jelas mengganggu kesehatan.





Program yang telah dilakukan untuk mendukung kinerja penanggulangan bencana adalah program pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana, program tanggap darurat di daerah terkena bencana, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang prasarana fisik, sosial dan ekonomi di wilayah pasca bencana.

“Ketiga program tersebut menggunakan alokasi anggaran APBN dan APBD, tentu pola penanganannya dengan koordinasi yang baik antar semua instansi terkait seperti BPBD, Kemensos dan Pemerintah dari tingkat Kabupaten/Kota hingga provinsi,” jelas Christiandy.

Ditambahkannya, sejak tahun 2010 Kalbar telah membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) melalui Perda No.7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda No.10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.

Meski demikian diakuinya, ada beberapa kelemahan dari BPBD setempat yang akhirnya menjadi hambatan. Diantaranya kurang aktifnya petugas Posko untuk mengadakan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam memperoleh informasi kejadian-kejadian bencana. Selain itu, pada saat kejadian bencana BPBD Kabupaten/Kota tidak merinci secara detail kebutuhan pokok bagi korban bencana.

Tidak hanya itu, Christiandy juga mengatakan bahwa



Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah bertukar cinderamata dengan Wagub Kalbar.

selama ini Kabupaten/Kota masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB dalam penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana penunjang Posko dalam kesiapsiagaan dan darurat bencana serta tenaga posko yang belum sepenuhnya menguasai peralatan Posko seperti HT atau radio komunikasi menjadi hambatan utama dalam menjalankan program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kalbar. (Ayu) foto: ayu/parle/iw.

## Posisi Tawar Petani Garam Indonesia Rendah



Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo.

Petani garam di Indonesia mayoritas merupakan para petani garam kecil yang posisi tawarnya sangat rendah di hadapan para pengepul. Inilah yang terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Apalagi, mereka belum memiliki akses teknologi yang memadai untuk memproduksi garam menjadi lebih baik.

Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo (F-PG), Senin (24/3). “Petani garam kita itu mayoritasnya terdiri atas petani garam kecil-kecil yang posisi tawarnya lemah sekali di hadapan para pengepul. Mereka juga memiliki modal yang sangat terbatas sehingga ijon garam sebelum panen itu sering terjadi dengan harga yang murah,” keluh Siswono.

Akses teknologi yang minim, membuat kualitas produksi garam para petani tidak memenuhi standar. Tidak saja kandungan NaCl-nya yang rendah, tapi juga produksi garamnya relatif kotor bercampur tanah. Dari data yang ada, produktifitas garam nasional hanya sekitar 60-70 juta ton per tahun per hektar. 80% dari produk tersebut masuk kualitas 2 dan 3. “Itu yang membuat harga garam menjadi lebih murah. Hanya 20% yang masuk kelas 1. Ini terjadi karena teknologinya yang

sangat terbelakang,” jelas Siswono.

Kualitas garam itu ditentukan tingkat kebersihan. Ini, kata Siswono, terkait dengan teknik pemanenannya. Kualitas garam juga ditentukan kadar NaCl. Semakin tinggi kadarnya, semakin tinggi kelasnya. Di Indonesia belum mampu memenuhi dua kriteria itu sebagai garam kelas satu. “Pada umumnya garam di Indonesia yang dihasilkan para petani garam masuk kategori garam konsumsi.”

Untuk produk garam konsumsi sebenarnya Indonesia sudah bisa swasembada. Produksi garam konsumsi satu setengah juta ton/tahun. Sementara kebutuhan garam industri kurang lebih satu setengah juta ton juga. Inilah yang belum mampu dipenuhi, sehingga selalu diimpor. Jadi dari 3 juta ton kebutuhan garam nasional, Indonesia baru bisa memenuhi 50%-nya saja. (mh) foto: iwan armanias/parle.

## PJTKI dan Asuransi Harus Bertanggungjawab

Permasalahan seputar Tenaga Kerja Indonesia masih terus terjadi. Wilfrida terus menghadapi sidang pengadilan. Sementara itu, Satinah masih terus dihantui hukuman mati jika tidak membayar denda (denda) kepada Arab Saudi sebesar Rp 21 miliar.

“Saya melihat bahwa kejadian-kejadian TKI ini menunjukkan hubungan antar negara sesama penganut Islam ini tidak betul-betul ditegakkan. Kita tahu, Arab Saudi negara Islam, TKI yang kerja di sana juga beragama Islam. Kalau memaafkan TKI, jangan ada dibalik itu tekanan untuk meminta ganti rugi, yang jelas-jelas kita tidak mampu,” kata Ketua DPR RI Marzuki Ali saat ditemui di Gedung Nusantara, Selasa (25/03).

Politisi Demokrat ini menyatakan, dalam hal ini Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) harus turut bertanggung jawab dalam permasalahan TKI ini.

“Ketika TKI berangkat bekerja ke luar negeri sudah membayar premi kepada perusahaan asuransi, jadi asuransi wajib bayar. PJTKI yang memberangkatkan, wajib membantu. Sisanya baru negara. Sekarang tugas mereka (asuransi dan PJTKI) untuk membayar denda. Jangan rakyat diminta untuk patungan, kan kasihan,” tambah Politisi asal Dapil Jakarta ini.

Dalam hal ini, tambah Marzuki, Raja Arab Saudi juga



Ketua DPR RI Marzuki Ali.

memiliki peran dalam pembebasan TKI yang bermasalah. Seorang Raja harus bisa memberikan intervensi kepada rakyatnya.

“Peran Raja Arab Saudi sebagai negara sahabat itu harus ada. Masak dibiarkan rakyatnya memeras Indonesia. Denda Rp 21 miliar kan sudah unsur memeras. Ia harus memberikan intervensi kepada rakyatnya,” kata Marzuki geram.

Selain itu, Marzuki mengingatkan kepada Pemerintah Arab Saudi untuk melihat latar belakang pembunuhan yang dilakukan oleh TKI terhadap majikannya. Ia yakin, ada tekanan tertentu sehingga TKI terpaksa membunuh.

“Kita juga turut berduka ada warga Arab Saudi yang meninggal. Tapi kita juga mesti tahu latar belakang membunuh itu, kenapa? Pasti ada tekanan psikologis dari majikannya, atau tidak mendapat perlakuan yang adil. Karena tekanan, secara psikologis menjadi terpaksa melakukan itu,” tutup Marzuki. (sf,mp), foto : andri/parle/iw.

## Menurunnya Kepercayaan Terhadap Parlemen Ancam Demokrasi



Suasana sidang ASGP di Swiss.

Menurunnya kepercayaan publik terhadap parlemen di seluruh dunia merupakan ancaman bagi demokrasi. Untuk itu, perlu perhatian partai politik, pemerintah, dan sekretariat jenderal di setiap parlemen.

Penegasan atas realitas kekinian tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti Swasanany di hadapan Sidang *Association of Secretaries General of Parliament (ASGP)* di Jenewa, Swiss. Sidang yang berlangsung 17-20 Maret lalu itu, diikuti para Sekjen parlemen dari seluruh dunia. Menurunnya kepercayaan publik tidak saja pada parlemen sebagai lembaga, tapi juga pada individu politisinya itu sendiri.

Menurut Win, begitu Sekjen DPR biasa disapa, semua pemangku kepentingan terhadap parlemen dan demokratisasi harus melakukan upaya bersama dan menyatukan sumber

daya dengan mengintegrasikan berbagai program untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen. Misalnya, lanjut Win, di DPR RI dilakukan pendidikan politik dan sosialisasi produk DPR RI kepada seluruh masyarakat.

Ini penting dilakukan, untuk meningkatkan kompetensi para Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berlandaskan pada kepentingan rakyat. Inilah peran penting Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system dalam membantu kinerja

parlemen.

Win berpendapat, reformasi birokrasi harus secara konsisten dan berkelanjutan dilakukan. Dalam konteks reformasi birokrasi ada 3 (tiga) prioritas yang ditekankan, yaitu memperkuat kelembagaan, melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*, dan membangun kapasitas sumber daya manusia. Apa yang disampaikan Win tersebut, mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari banyak negara dalam pertemuan ASGP kali ini. (mh), foto : dok/parle/hr.

## Sekjen DPR RI Jadi Anggota Executive Committee ASGP

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti Swasanany terpilih menjadi Anggota *Executive Committee, Association of Secretaries General of Parliament (ASGP)* di Jenewa, Swiss. Sidang yang berlangsung pada 17-20 Maret lalu, dihadiri para Sekjen parlemen dari seluruh dunia.

ASGP merupakan organisasi yang menjembatani komunikasi antara para pimpinan Sekretariat Jenderal parlemen di seluruh dunia. Sidang ASGP sendiri selalu dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Sidang *International Parliamentary Union (IPU)*. Pada sesi pemilihan, anggota *executive committee*, Indonesia bersama Yunani dan India bersaing melalui voting dengan sistem *secret ballot* untuk meraih dua posisi kosong yang tersedia.

Dalam voting dengan total 106 pemilih tersebut, Indonesia memenangkan 46 suara, disusul oleh India yang meraih 39 suara, dan Yunani memperoleh 20 suara, serta terdapat 1 suara abstain. Terpilihnya Win sebagai salah satu Anggota *Executive Committee ASGP*, merupakan kali pertama dalam sejarah keanggotaan Indonesia dalam ASGP. Keberhasilan Win tidak lepas dari kontribusi nyata Indonesia dalam sidang ASGP.

Selaku Sekjen DPR RI, ia aktif membangun komunikasi dengan para peserta dari berbagai negara, sehingga mendapat kepercayaan dan dukungan dari negara-negara di kawasan Eropa, Arab, Afrika, dan Asia. Dukungan untuk Indonesia, secara mengejut-



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti memberikan suara dalam pemilihan anggota *Executive Committee Sidang ASGP*.

kan juga datang dari negara-negara berbahasa Spanyol (*Spanish speaking countries*). Keberhasilan Win menempati keanggotaan *Executive Committee ASGP*, secara otomatis meningkatkan peran Indonesia dalam pergaulan internasional, khususnya di tingkat parlemen.

Di sela-sela persidangan, dia sempat melakukan pertemuan multilateral antarparlemen negara-negara anggota PUIIC. Pertemuan tersebut untuk menyepakati pembentukan ASGP bagi negara-negara Islam. Dalam kesepakatan itu, akan diagendakan pertemuan secara reguler di tengah-

tengah sidang ASGP untuk membahas topik-topik yang menjadi kepentingan bersama. Dan rencananya pertemuan pertama anggota ASGP negara-negara Islam digelar di Turki.

Selain bertemu para anggota PUIIC, Sekjen DPR RI juga menghadiri pertemuan multilateral antar parlemen negara-negara anggota AIPA yang membahas pentingnya komunikasi intensif pada tingkat pejabat Sekretariat Jenderal sebagai *supporting system* parlemen. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung program-program bersama dalam menghadapi ASEAN Community 2015. (mh), foto : dok/parle/hr.

# Kaderisasi Pengurus Koperasi Penting



Wakil Sekjen DPR RI Ahmad Djuned didampingi Kabiro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko.

Koperasi Pegawai (Koppeg) Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan pendidikan perkoperasian secara berkesinambungan untuk menciptakan kader-kader baru yang handal. Pendidikan dan Latihan (Diklat) juga dipandang penting untuk mengasah kemampuan sehingga dapat melahirkan ide yang inovatif dan kreatif dalam melayani anggota dan publik.

“Pendidikan perkoperasian ini penting bagi pengkaderan pengurus. Kita harus meningkatkan pengetahuan, salah satu cara dengan melakukan pendidikan dan latihan. Tambahan pengetahuan membuat pengurus lebih kreatif dan inovatif dalam mem-

berikan pelayanan kepada anggota dan publik,” kata Wakil Sekjen DPR RI Ahmad Djuned saat membuka secara resmi Diklat Koperasi di Kopo, Jabar, Jumat (21/3/14).

Ia mengingatkan sejarah panjang perjuangan Koperasi Setjen DPR selama 29 tahun dalam meniti sukses harus menjadi pelajaran. Dimulai dengan kegiatan simpan pinjam sekarang membesar dengan 9 kegiatan perdagangan dan jasa, serta Sisa Hasil Usaha mencapai Rp 2 miliar.

“Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan anugerah Koperasi Pegawai Terbaik se-Indonesia. Tahun

selanjutnya kita perlu tingkatkan terus kinerjanya, kita berharap tidak saja terbaik untuk kategori koperasi pegawai tetapi terbaik pada umumnya,” lanjutnya memotivasi.

Sementara itu dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksana Syaeful Anwar mengatakan pelaksanaan Diklat untuk menyikapi perubahan cepat yang terjadi dalam bisnis khususnya perkoperasian. Ada 4 materi utama yang dibahas yang paling utama adalah aturan baru tentang pemisahan koperasi simpan pinjam dengan koperasi perdagangan.

“Tahun 2012 telah hadir UU Perkoperasian yang baru. Semangat UU baru adalah mengembangkan koperasi diantaranya ada amanat pemisahan jenis usaha koperasi simpan pinjam dan perdagangan. Pengurus dan kader perlu punya pemahaman dan bagaimana strateginya supaya koperasi bisa menyikapi perubahan dan tantangan bisnis kedepan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu ia juga melaporkan pertengahan bulan April nanti akan berlangsung pesta demokrasi Koppeg Setjen DPR dengan agenda utama pemilihan pengurus baru. Saat ini tercatat dua pasangan kandidat akan merebut hati para anggota. Mereka adalah Mohammad Djazuli dan Hariyadi serta Ade Efendi dan Sulistyono. (iky) foto: ical/parle/hr.

## Koperasi Setjen DPR Harus Lebih Baik

Sejumlah prestasi bahkan Terbaik Tingkat Nasional sudah pernah diraih Koperasi Pegawai (Koppeg) Sekretariat Jenderal DPR RI. Keberhasilan itu hendaknya jangan membuat lengah karena dinamika tantangan perkoperasian di tanah air sangat dinamis.

“Kita sudah dapat pencerahan menyikapi sejumlah perubahan dibidang perkoperasian. Bagaimana menyiasati perubahan, ilmunya sudah diberikan. Pertemuan ini produktif sekali, semoga jadi bekal untuk mengelola koperasi kita lebih sehat, lebih kuat dan lebih mandiri,” kata Djaka Dwi

Winarko Ketua Pengawas Koppeg Setjen DPR saat menutup Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Kopo, Bogor, Jabar, Sabtu (22/3/14).

Djaka yang juga Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR ini menyebut dalam Diklat dikupas sejumlah perubahan yang tertuang dalam UU no.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pengurus dan kader Kopkar yang mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat menyesuaikan diri dalam menyiapkan rencana kerja ke depan.



Foto bersama peserta diklat Koperasi Setjen DPR RI.

Sementara itu Roy Kuncoro dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang menjadi pembicara dalam diklat ini mengingatkan pengurus untuk melihat semua tantangan dari sisi positif. “Dibalik *threat* ada *opportunity* dibalik kelemahan ada kekuatan, semua bukan untuk kita takut tapi untuk dihadapi. Dengan konstelasi yang baru mari dorong koperasi kita tumbuh dan berkembang menjadi entitas usaha yang besar,” tekannya.

Pembicara lain dalam pertemuan ini adalah instruktur dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pembahasan terfokus pada sejumlah aturan perundang-undangan pasca ditetapkannya UU no.17/2012 yang merupakan pengganti aturan lama yang dinilai sudah tidak sesuai perkembangan yaitu UU no.25 tahun 1992. (iky) foto: ical/parle/hr.

## Anggaran Kesehatan Masih Jauh dari Amanah UU Kesehatan

Menyusul minimnya anggaran kesehatan di tengah pelaksanaan program BPJS Kesehatan, pemerintah dinilai belum membangun keberpihakan yang optimal kepada masyarakat di sektor kesehatan.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati kepada Parle. Keberpihakan yang tidak optimal itu terlihat dari banyaknya klaim rumah sakit untuk program Jamkesmas 2013. Banyak rumah sakit yang menjadi mitra Jamkesmas mengeluhkan klaimnya yang belum dilunasi pemerintah. Kondisi terakhir, banyak rumah sakit malah tidak bisa lagi berutang ke pabrik besar farmasi untuk mendapatkan obat-obatan.

Bila saja klaim Jamkesmas terdahulu bisa segera dilunasi, rumah sakit yang ditunjuk menjadi mitra tidak akan kekurangan stok obat-obatan. Ini hanya satu masalah saja di sektor kesehatan. Padahal, UU Kesehatan No.36/2009 mengamanatkan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN. “Sekali lagi, pemerintah belum memprioritaskan hal ini. Lihat saja, anggaran kesehatan masih jauh dari amanah

UU Kesehatan yang menyatakan besaran anggaran kesehatan 5% dari APBN,” keluh Okky.

Menurut Anggota Fraksi PPP itu, pagu anggaran Kemenkes 2014, memang, sangat memprihatinkan. Dalam pagu anggaran 2014 untuk sektor kesehatan, itu sudah termasuk anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN dari BPJS Kesehatan. Karena sudah dipotong PBI, Kemenkes hanya menerima 2,2% saja dari sisa anggaran tersebut. Idealnya, anggaran PBI terpisah dari anggaran kesehatan secara keseluruhan. Dengan begitu, Kemenkes bisa optimal menjalankan semua program kesehatan untuk rakyat.

“Tentu tidak banyak yang bisa diperbuat dengan anggaran sebesar itu. Piutang rumah sakit, memang, harusnya di luar struktur anggaran 2014. Kemenkeu harus mengalokasikannya dari simpanan cadangan yang ada di keuangan negara. Sudah saatnya pemerintah memprioritaskan masalah kependudukan, yang salah satunya adalah kesehatan. Diperlukan pemimpin yang berpihak dan peka



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati.

dengan masalah kependudukan,” jelas Okky.

Pada tahun 2025, sambung Okky, Indonesia akan dihadapkan pada bonus masalah demografi (kependudukan). Untuk itu, perlu berbenah sejak sekarang, karena ini menyangkut pula dengan layanan kesehatan. “Kalau tidak dibenahi dari sekarang, bukannya bonus yang akan kita dapatkan, tetapi beban yang terus memberati negara. Dengan mengetahui peta kondisi statistik kependudukan, maka pembangunan yang tepat sasaran bisa dilakukan,” terang Okky mengakhiri wawancara. (mh) foto: odjie/parle/iw.

# Komisi V Minta Pemda Mimika Selesaikan Status Tanah Pelabuhan Pomako



Tim Kunker Komisi V DPR RI menerima penjelasan terkait pembangunan Pelabuhan Pomako, Timika.

Komisi V DPR RI mendapatkan masukan terkait status tanah Pelabuhan Pomako. Ketua Komisi V Michael Wattimena mengkhawatirkan kalau terjadi polemik seperti itu maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi terkendala.

“Pembebasan tanah atau lahan bukan wewenang Pemerintah Pusat, tapi itu wewangnya Pemerintah Daerah,” kata Michael Wattimena, saat Kunjungan Kerja Komisi V ke Pelabuhan Pomako, Timika, Papua belum lama ini.

Michael Wattimena mengatakan Komisi V mau daerah ini menjadi maju. Salah satu faktor untuk maju, perlu mengusahakan transportasi laut sebagai ujung tombak. “Laut sebagai salah satu sarana vital dalam rangka memajukan perekonomian di daerah ini,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi V Etha Bulu bahwa persoalan tanah bukan DPR punya urusan tetapi Pemda. Menurutnya, APBN turun kalau persoalan tanah beres. Jadi apapun namanya Pemda punya tanggung jawab soal tanah.

“Di Papua sering terjadi persoalan status tanah tidak beres. Karena tidak ada yang mengurus,” kata Etha Bulu memberikan masukan.

Kepala Syahbandar Pelabuhan Po-

mako Jimmy Samory memberikan penjelasan kepada Komisi V bahwa Pelabuhan Pomako telah beroperasi dan dikelola Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, namun status hukum tanah Pelabuhan Pomako belum jelas. “Pemerintah daerah telah membebaskan, tetapi dikemudian hari itu juga dibebaskan oleh pengusaha. Jadi lokasi yang sama dikuasi oleh Pemerintah Daerah dan pengusaha,” paparnya.

Sampai hari ini, secara hukum, belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Kondisi sejak awalnya seperti begitu, yang membangun Dirjen Perhubungan Laut dengan menggunakan APBN, karena kebutuhan daerah sangat mendesak.

Menurut Jimmy Samory, dirinya telah berkali-kali menulis surat, tapi sampai sekarang belum ada proses penyelesaian antara Pemda dan Pengusaha. Semula yang memiliki masyarakat adat Kamoro dan Kamoro melakukan dua pelepasan, pertama kepada Pemerintah Daerah tahun 2000, dan tahun 2004 dikeluarkan pelepasan yang kedua untuk pengusaha. “Ada satu pengusaha yang memang berdomisili di Timika yaitu PT. Langgung,” ungkap Kepala Syahbandar Pelabuhan Pomako.

Persoalan ini telah beberapa kali dibawa ke Pemerintah Daerah untuk diselesaikan, tapi sampai sekarang

belum berhasil. Jimmy Samory memberikan informasi bahwa pada bulan Desember 2013, masyarakat mengklaim ke Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta. Selanjutnya dirinya dipanggil mengklarifikasi dan menjelaskan status tanah ini.

“Terus dikembalikan dari Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk diselesaikan, namun sampai sekarang masih menunggu karena belum ada Pejabat Daerah Definitif, sehingga belum ada langkah-langkah penanganan penyelesaian,” katanya.

## Prioritas Kebutuhan Pelabuhan

Pada Kesempatan tersebut, Komisi V juga mempertanyakan kebutuhan prioritas Pelabuhan Pomako.

Jimmy Samory, Kepala Syahbandar Pelabuhan Pomako menjelaskan, data yang dipaparkan dari hasil kunjungan kapal yang bongkar muat, Dirjen Perhubungan Laut menyebutkan dermaga pelabuhan ini harus ditambah dan diperpanjang.

“Saya sebagai Pimpinan pelabuhan disini tidak mau membuat program penambahan, karena masalah tanah ini belum diselesaikan. Oleh karena itu kami pending sementara untuk pengembangan selanjutnya,” ujarnya dengan menambahkan bahwa kapasitas dermaga minim dimana panjangnya 215 Meter, sedangkan Kapal Penumpang panjangnya 110.

Ketua Komisi V Michael Wattimena mengatakan keterbatasan dermaga menimbulkan biaya dan harga barang tinggi sehingga masyarakat menjadi korban.

“Kami mengharapkan dermaga ini diperpanjang supaya jika kapal penumpang masuk kapal-kapal yang sedang bongkar muat tidak terganggu. Namun dengan status tanah seperti itu pemerintah Pusat belum tentu memberikan anggaran sehingga perlu menunggu bupati definitif,” tegasnya.

(As) foto: agung/parle/hr.



## Wakil Bicara



Anggota Komisi IV DPR Hermanto Tanjung

**“Kita sadari kebakaran ini sudah berulang-ulang. Pemerintah perlu lakukan tindakan konkrit, menangkap para pelaku. Pemda segera menindak jangan hanya statemen saja.”**

**“Pemerintah memposisikan TKI sebagai masyarakat kelas tiga. Kenapa? Karena perlindungan dan pelayanan yang terkait dengan pekerjaan mereka di luar negeri agar aman dan nyaman, tidak ada upaya yang lebih serius dari negara. Seolah-olah TKI hanya diperlakukan sebagai komoditi dan penghasil devisa.”**



Anggota Komisi IX Indra



Anggota Komisi VIII Noura Dian Hartarony

**“Dalam Pendidikan, Jangan ada diskriminasi antara sekolah atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perguruan Tinggi di bawah naungan Kementerian Agama”**

# Kasus Terorisme di Poso Perlu Kajian Mendalam

Anggota Komisi III DPR RI Syarifudin Sudding meminta aparat pemerintahan dan kepolisian di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian mendalam terhadap kasus terorisme terus berulang Kabupaten Poso. Sebagai wakil rakyat ia mengaku memperoleh data dan fakta yang menurutnya patut ditindaklanjuti.

“Perlu ada satu kajian mendalam jangan sampai persoalan Poso dijadikan proyek, pengalihan isu, lalu kemudian anggota kepolisian yang jadi korban, saya prihatin. Saya tidak yakin ini aksi terorisme semata, saya pikir pimpinan tingkat atas perlu menyelesaikan. Kalau menelusuri laporan masyarakat dan wartawan dugaan tadi mengandung kebenaran, namun ini perlu kajian,” katanya saat rapat dengan jajaran mitra dalam Kunjungan Kerja di Palu, Sulteng, baru-baru ini.

Sementara itu anggota Tim Kunker Abu Bakar Alhabsy meminta Pemprov dan Polda Palu memperhatikan aspek sosiologis dalam mengurai permasalahan teror di propinsi yang sebagian wilayahnya berhadapan langsung dengan negara tetangga Filipina ini. Ia meminta perlu mengoptimalkan kerja sama segenap pihak termasuk tokoh masyarakat dalam menghadapi praktek radikalisme.

“Soal terorisme apa ini sandiwara, apa ini dipelihara, itu memang fakta menyakitkan,” ujar politisi dari Fraksi PKS ini. Pada bagian lain ia juga mengingatkan aparat Polda Sulteng dalam menangani terduga terorisme sesuai protap yang ada.



Tim Kunker Komisi III DPR RI saat pertemuan dengan mitra kerja di Kantor Polda Sulteng.

“Saya mendapat laporan ada penganiayaan terhadap terduga Suherman, dia dipaksa menggigit sepatu petugas. Ada praktek radikalisme memang, tapi dalam penanganannya jangan main timpa saja,” tandasnya.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol. Ari Dono Sukmanto menjelaskan aksi teror terbaru terjadi 25 Februari lalu di Desa Pantangolemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Sejumlah langkah telah diambil diantaranya penggerebekan tempat persembunyian dan pengejaran terhadap pelaku.

“Sejumlah langkah telah dilakukan untuk mengatasi aksi kelompok radikal dan kelompok sipil bersenjata. Kepolisian telah melakukan patroli dialogis, membentuk pos dan melakukan penjagaan di tempat-tempat rawan keluar masuk anggota kelompok,” tutur Kapolda. (iky) foto: ical/parle/hr.

## Komisi IX Apresiasi Kepedulian DIY Pada Transmigran



Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno tukar cinderamata dengan Wagub DIY.

Komisi IX DPR mengapresiasi para pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang peduli terhadap para transmigran yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kepedulian tersebut ditunjuk kan langsung Wagub DIY Sri Paku Alam IX yang telah mengunjungi transmigran asal Yogyakarta yang tersebar di Pulau Sumatera hingga Maluku.

Demikian terungkap saat Tim Kunker Komisi IX DPR yang dipimpin Wakil Ketua Soepriyatno menggelar pertemuan dengan Pemda DIY yang diwakili Sri Paku Alam IX dan jajarannya di Yogyakarta baru-baru ini.

Wagub DIY menyebutkan, program



transmigrasi akan terus digalakkan di daerahnya karena wilayah DIY sempit sementara jumlahnya penduduknya cukup besar sekitar 5 juta jiwa, sehingga dengan luas lahan satu kilometer persegi bisa dihuni sebanyak 1.000 orang. “Karena keterbatasan lahan inilah maka perlu dicarikan solusi melalui program transmigrasi,” ujarnya.

Kepada Tim DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan, kesehatan

dan transmigrasi ini, Sri Paku Alam mengungkapkan bahwa animo masyarakat yang dikunjungi besar sekali. “Mereka menyambut baik sekali, bahkan meminta kalau bisa dikirim transmigran asal Yogya semua,” serunya yang disambut para anggota Komisi IX.

Apresiasi yang sama diungkapkan Disnakertrans DIY bahwa Sri Paku Alam rajin mengunjungi lokasi transmigran asal Yogya di berbagai wilayah tanah

air. Bahkan tidak semata-mata kunjungan, Sri Paku Alam juga membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi para transmigran. Termasuk keluhan, telah enam tahun tinggal di lokasi transmigrasi tetapi belum mendapatkan KTP. Akhirnya mendapatkan jaminan akan segera mendapatkan KTP. “Kalau selama ini terlambat bisa jadi karena waktunya bersamaan dengan pilkada, sehingga tertunda,” katanya. (mp) foto: mastur/parle/iw.

## Kabupaten Murung Raya Belum Memiliki Kantor Perpustakaan Daerah

Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Rudiansyah Iden mengemukakan, sampai saat ini Kabupaten Murung Raya (Mura) belum memiliki Kantor Perpustakaan Daerah.

Hal tersebut ia sampaikan saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X sekaligus Ketua Tim Kunker Agus Hermanto di Aula Jayang Tinggang Kantor Gubernur Provinsi Kalteng, belum lama ini.

Menurut informasi yang diterimanya, belum adanya kantor tersebut lantaran Dewan setempat belum menyetujuinya. “Belum terbentuknya kantor ini tentu akan berpengaruh terhadap pelayanan perpustakaan di daerah ini,” katanya.

Di sisi lain, dari 12 Kabupaten/Kota yang ada, Kepala Perpustakaan dijabat oleh Eselon IIIa atau setingkat dengan Kepala Bagian, sedang Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sudah Eselon IIb.

“Ini juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi, baik dengan instansi terkait maupun dengan Dewan khususnya masalah anggaran,” jelas Rudiansyah.

Artinya, kalau jabatan Kepala Badan tersebut dijabat oleh Eselon IIb, maka diharapkan keberadaan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi lebih mempunyai greget, sehingga anggaran yang akan dialokasikan juga cukup besar. Namun hal itu semua kembali lagi dengan komitmen Kepala Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Irsal Yunus mengatakan, keberadaan perpustakaan khu-

asanya perpustakaan sekolah banyak dinilai kalangan tidak menjadi hal pokok dan dianggap hanya sebagai pelengkap saja. “Padahal dari perpustakaan itulah kita menjadi pintar,” tegasnya.

Untuk itu Irsal berharap, agar perpustakaan di daerah ini terus ditingkatkan, bahkan dia berharap agar di Kabupaten/Kota memiliki WiFi gratis, sehingga masyarakat, pelajar dan



Ketua Komisi X Agus Hermanto dan tim kunker kunjungi perpustakaan daerah Kabupaten Murung Raya.

mahasiswa dapat mengunduh ataupun men-download materi yang diperlukan.

Disamping itu juga, minat baca masyarakat dilihat dari jumlah kunjungan ke Perpustakaan makin meningkat, apalagi Kalteng sudah memiliki 13 Kantor Perpustakaan di 13 Kabupaten/Kota yang merupakan perpustakaan umum dan terdapat 200 perpustakaan khusus, tambah Irsal. (hr) foto: eka hindra/parle.

## Komisi VIII Terima Keluhan Terkait BSM di Kemenag

Komisi VIII DPR RI menemukan sejumlah permasalahan terkait program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di lingkungan Kementerian Agama Kalimantan Barat.

Hal tersebut terungkap saat Komisi VIII meninjau, dan mendengar langsung keluhan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah dan Tsanawiyah di seluruh wilayah Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu.

“Kami mendengar langsung dari seluruh kepala MIN, MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta), Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah se Kalimantan Barat, bahwasanya program BSM yang sebenarnya bertujuan baik untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama dan layak pada anak bangsa yang bernasib kurang beruntung ini ternyata pada implementasinya ada kendala yang pada akhirnya malah menyulitkan si anak atau siswa tersebut,” jelas Anggota Komisi VIII Kasma Bouty yang ikut dalam Tim Kunjungan Kerja ke MAN 2 Pontianak, Kalbar, belum lama ini.

Dilanjutkannya, permasalahan tersebut diantaranya adalah pembukaan rekening untuk menyalurkan dana BSM ke masing-masing siswa memerlukan waktu yang cukup lama. Banyaknya pengambil BSM membuat orangtua siswa harus mengantri di BNI sebagai bank yang ditunjuk bahkan tidak jarang orangtua siswa harus kembali keesokan harinya padahal jarak antara rumah dan BNI cukup jauh.

Belum lagi adanya peraturan di BNI yang tidak membolehkan siswa mengambil semua dananya alias harus mengendapkannya di rekening tersebut sebesar 15-25 ribu rupiah. Alhasil dana yang dibawa pulang orangtua siswa pun tidak utuh seperti yang ditentukan pemerintah.

Atas dasar itulah maka anggota Komisi VIII DPR RI, Rayhan Iskandar meminta salah satu Direktur Pendidikan Islam Kemenag Pusat yang ikut hadir dalam kesempatan itu untuk meng-



Kasma Bouty (kanan) bersama Tim Kuncker Komisi VIII DPR.

kaji ulang keputusan penggunaan BNI sebagai mitra penyaluran dana BSM.

“Penunjukan BNI ini menurut Direktur Pendidikan Islam terdapat dalam Petunjuk Teknis (juknis) yang dikeluarkan pusat atas dasar SK Menteri Keuangan yang mengharuskan penyaluran BSM melalui bank negara. Tapi tentunya bank yang dimaksud merupakan bank yang memiliki komitmen yang kuat untuk membantu proses penyaluran dana BSM, sehingga tidak semata memikirkan sisi komersil. Inilah yang harus ditinjau ulang,” tegas Rayhan yang diamini Kasma Bouty dan seluruh anggota Komisi VIII yang hadir.

(Ayu) foto: ayu/parle/iw.

## Masyarakat Kalbar Berharap Bandara Supadio Segera Jadi Embarkasi

Masyarakat Kalimantan Barat berharap Bandara Supadio Pontianak dapat segera menjadi embarkasi haji. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya kepada Komisi VIII DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja, baru-baru ini di Kantor Gubernur Kalbar.

“Masyarakat Kalbar berharap dukungan dari Komisi VIII agar Bandara Supadio bisa segera menjadi bandara untuk keberangkatan atau kedatangan jemaah haji atau embarkasi, sehingga jemaah tidak harus ke Batam terlebih dahulu. Dengan begitu juga akan menghemat biaya,” harap Christiandy.

Selain itu menurut Wakil Gubernur Kalbar ini, saat ini bandara Supadio Pontianak juga tengah dilakukan renovasi dengan rencana pembuatan runway dengan landasan yang lebih luas lagi.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa mengatakan jika memang hal tersebut dapat meringankan biaya dari jemaah pihaknya akan mendukung langkah



Ketua dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah dan Ledia Hanifa.

tersebut. Meski demikian faktor keselamatan tetap harus diperhatikan.

“Apakah nanti bandara tersebut sudah layak dijadikan embarkasi, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan tentunya Kementerian Perhubungan,” papar politisi dari Fraksi PKS ini. (Ayu) foto: ayu/parle/iw.

## Jangan Bawa Anak Saat Kampanye

Kampanye mulai didengungkan per 16 Maret lalu. Badan Pengawas Pemilu menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik. Salah satu yang pelanggaran yang menjadi sorotan adalah kampanye yang melibatkan anak-anak.

“Komisi Pemilihan Umum sudah melarang partai politik untuk kampanye tidak membawa anak-anak. Dikawatirkan, kalau terjadi apa-apa pada saat kampanye. Keterlibatan anak-anak dalam kampanye harus segera ditindak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Anggota Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi via telepon, Kamis (27/03).

Politisi Golkar ini menambahkan, kampanye cukup melibatkan orang dewasa saja. Orasi kampanye belum diperlukan bagi anak-anak, karena mereka belum mempunyai hak pilih pada pemilu.

“Kampanye ini kan kegiatan dewasa, jadi saya rasa tidak perlu diikuti oleh anak-anak. KPU harus memberi sanksi



Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

tegas kepada partai politik manapun yang melibatkan anak-anak pada kampanyenya, terutama kampanye terbuka,” ingat Politisi asal Dapil Banten I ini.

Terkait dengan usulan untuk menyediakan tempat penitipan anak, Ace menilai ini langkah bagus. Namun, perlu dilihat, seberapa besar pengaruhnya terhadap kelangsungan kampanye.

“Saya kira, silahkan kalau ingin menyediakan tempat penitipan anak. Tapi kan kampanye hanya berlangsung

beberapa saat. Mungkin sebaiknya anak-anak tidak diajak dulu. Tempat penitipan anak itu sepertinya belum memberikan pengaruh yang signifikan,” imbuh Ace.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai penyediaan tempat penitipan anak di sekitar lokasi kampanye merupakan langkah yang baik. Menurutnya, jika anak-anak ditinggal di rumah, dikawatirkan akan menimbulkan masalah lain.

“Saya kira tindakan yang bagus untuk menyediakan tempat penitipan anak di sekitar tempat kampanye. Orang tua yang meninggalkan anaknya di rumah sendirian itu juga dapat menimbulkan problem. Akan lebih baik di sekitar lokasi kampanye disiapkan tempat penitipan anak, sehingga anak-anak itu bisa bermain di sana, tidak ikut dalam area kampanye. Itu satu-satunya cara untuk mensiasati larangan KPU untuk tidak membawa anak berkampanye,” ujar Marzuki. (sf), foto : iwan armanias/parle/hr.

## Orientasi BUMN Berbeda Dengan Perusahaan Swasta Murni

Orientasi sebuah BUMN berbeda dengan orientasi perusahaan swasta murni. BUMN dibentuk tidak semata-mata untuk mencari untung belaka. Tetapi lebih untuk memberi pelayanan kepada publik.

“Harus dipertahankan, iya. Tetapi ada unsur-unsur lain yang membuat watak sebuah BUMN pasti berbeda dengan watak perusahaan swasta murni,” tegas Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka saat menanggapi penjelasan Menteri BUMN terkait pelaksanaan Panja Rekomendasi *Outsourcing* Komisi IX DPR di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Jakarta, baru-baru ini.

Ditegaskan Rieke, BUMN tetap

harus patuh pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Apapun perusahaannya, siapapun orang dibelakangnya, urusan ketenagakerjaan harus patuh pada UU Ketenagakerjaan tidak perlu pada Panja,” pungkasnya.

Rieke mengkritisi pernyataan Menteri BUMN, bahwa BUMN jangan menenderkan suatu pekerjaan dalam satu tahun, tapi tenderkan dalam lima tahun dan diperpanjang tiga kali. Menurut Rieke, pernyataan tersebut benar-benar sebuah pernyataan yang secara verbal melanggar UU Ketenagakerjaan.

“Masalah *outsourcing* ini sempat kami kritisi pernyataan bapak, tapi



Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka.

hari ini Bapak ulangi lagi. BUMN Jangan menenderkan pekerjaan satu tahun, tapi tenderkan lima tahun dan diperpanjang 3 kali. Pak, pernyataan ini benar-benar sebuah pernyataan secara verbal melanggar UU Ketenagakerjaan,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Rieke meminta perhatian kepada siapapun yang punya kecurigaan bahwa masalah *outsourcing* ini menjadi panggung politik karena berkaitan dengan Pemilu Legislatif. Ditegaskan

Rieke, sama sekali tidak ada.

“Ini tanggung jawab konstitusi kami sebagai anggota dewan yang duduk di Komisi IX. Tidak ada jaminannya kok buruh ini milik kita. Saya sudah ikut berbagai pemilihan, tidak ada jaminannya buruh itu milih kita. Di dapil kita masing-masing belum tentu milih kita mereka yang kita perjuangkan,” paparnya.

Dirinya tahu, bahwa ada serikat pekerja yang turut protes pada Menteri BUMN, Dahlan Iskan tapi pada saat diundang konferensi Partai Demokrat

di Jawa Timur, serikat pekerja tersebut hadir.

“Jadi ini tidak ada urusannya dengan keterpilihan atau tidak. Ini juga catatan buat kawan-kawan buruh,” imbuhnya.

Sebagai jawaban atas pertanyaan Menteri BUMN, rekomendasi mana yang telah dilanggar. Dalam kesempatan tersebut Rieke membacakan PHK yang terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN.

Diantaranya, Kasus Pelanggaran

*Outsourcing* di PT. Telkom Indonesia PHK 289 orang upah selama proses tidak dibayar. PT. Pertamina PHK 10 orang dan upah *Cleaning Service* masih dibawah upah Kabupaten/Kota tunjangan pensiun dan asuransi belum dibayar. PT. Jamsostek 1.055 orang belum dilakukan pengangkatan kepada pekerja/buruh yang menjadi korban *outsourcing* melanggar UU sementara perselisihan kasusnya di PHI-kan dan masuk kerja di non-jobkan. Kasus pelanggaran kontrak di Bulog dan upah dibawah upah minimum. (sc) foto: odjiele/parle/hr.

## DPR Akan Terus Upayakan Cabut Pemotongan Kuota Haji



Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah mengatakan bahwa masyarakat Kalimantan Barat sebenarnya tidak mempermasalahkan besaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Namun yang menjadi masalah adalah lama dan panjangnya daftar antrian untuk ke tanah suci.

Hal tersebut disampaikan Ida kepada Parle usai mengunjungi Kalimantan barat beberapa waktu lalu. Menurutnya, aspirasi masyarakat Kalimantan Barat yang diterimanya melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalbar, Husaini D Mahmud itu memang bukan tanpa alasan, mengingat saat ini antrian untuk pergi haji konon telah sampai untuk tahun 2020.

“Saat ini Komisi VIII DPR RI tengah mendesak Kementerian Agama untuk melakukan lobi agar pengurangan kuota 20 persen yang pernah terjadi di tahun sebelumnya, pada tahun 2014 ini dicabut. Dengan demikian akan mengurangi jumlah antrian,” jelas Ida Fauziyah kepada Parle.

Selain itu dilanjutkan Ida, pihaknya juga meminta agar Kementerian Agama membuat daftar prioritas pergi haji untuk calon jemaah haji yang baru pertama kali akan menunaikan ibadah haji. Karena pada dasarnya

yang diwajibkan adalah ibadah haji yang pertama. Sementara kepergian haji yang kedua atau kesekian kalinya hanya bonus ibadah semata. Tidak hanya itu, usia dan kondisi fisik juga menjadi barometer dalam penentuan skala prioritas bagi jemaah calon haji yang akan ke tanah suci.

Disamping permintaan pencabutan pengurangan kuota haji sebanyak 20 persen tersebut, Ida juga mengatakan bahwa BPIH tahun 2014 ini turun sebesar 308 dolar Amerika di banding tahun sebelumnya. Meski BPIH turun Ida akan terus mendorong Kementerian Agama untuk tidak secara equivalen menurunkan pelayanannya juga kepada para calon jemaah haji.

“Seringkali masyarakat berpikiran biaya turun, pelayanan juga turun. Tidak boleh seperti itu, biaya turun, pelayanan harus terus ditingkatkan,” tegasnya. (Ayu) foto: iwan armanias/parle.

## Perlu Gerakan Nasional Setop Kekerasan Pada Anak

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, perlunya tindakan kongkret atau gerakan yang bersifat nasional untuk menyetop semua bentuk kekerasan terhadap anak. Ia mengajak segenap komponen bangsa untuk bertindak kongkret cepat dan tepat, agar tidak lagi jatuh korban anak-anak di Indonesia.

“Kita meminta Presiden untuk turun tangan melakukan

gerakan, menghentikan semua bentuk kekerasan terhadap anak, agar nantinya, lahir generasi masa depan yang memiliki kecerdasan akhlak dan pribadi yang utuh tanpa dicerai oleh kasus-kasus kekerasan dan kejahatan,” tegas Ketua DPR di Jakarta, sehubungan masih terjadinya kekerasan demi kekerasan terhadap anak di di bumi pertiwi yang kita cintai.

Kasus Iqbal (3,5 tahun), yang mengalami kekerasan, kekejaman serta eksploitasi oleh seseorang, yang sampai kini masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta, adalah cermin dari kekerasan yang masih saja menimpa anak Indonesia. “Masih banyak Iqbal-Iqbal lain yang mengalami kasus serupa, telah mengetuk nurani kita semua. Kita bertanya: sampai dimana sistem perlindungan anak Indonesia,” ujarnya dengan menambahkan, pihaknya mendukung usulan KPAI agar dilakukan penancangan: Gerakan Nasional “Setop Kekejaman Terhadap Anak Indonesia”.

Menurut Marzuki Alie, Undang-undang Perlindungan Anak sudah ada sejak 12 tahun yang lalu, yaitu UU No. 23 tahun 2002. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga termasuk jajaran kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen dan Komnas Anak, sebenarnya telah menunjukkan aktivitas cukup berarti. Tetapi, kekerasan terhadap anak justru meningkat.

Berdasarkan permasalahan ini, maka Ketua DPR meminta perhatian semua pihak, agar dilakukan langkah kongkret, terstruktur dan terprogram, untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, anak-anak yang merupakan generasi masa depan bangsa.

Di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain dikatakan, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia Indonesia yang harus dijunjung tinggi.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diper-



Ketua DPR Marzuki Alie berdialog dengan Kak Seto dan KPAI.

lukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Undang-undang ini telah ada, tetapi implementasinya belum sepenuhnya sebagaimana yang kita harapkan. Perlindungan bagi anak-anak dilakukan oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi, dan korban kekerasan, baik fisik atau mental, penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam UU ini ungkap Ketua Dewan, juga diatur bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikhis dan seksual, dilakukan dengan upaya-upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan, yang melindungi anak korban tindak kekerasan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

“Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, para penggiat perlindungan anak, dan masyarakat luas, dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual sangat diperlukan, karena anak adalah tanggungjawab kita bersama,” demikian Marzuki Alie. (mp), foto : [denus/parle/hr](#).

## DPR Akan Evaluasi BPJS Juni Mendatang

Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Iqbal, menyebutkan DPR akan melakukan evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Juni 2014. Saat dihubungi pers baru-baru ini, ia mengatakan evaluasi yang dilakukan pada Juni 2014 ini untuk membahas kendala yang dihadapi dalam peluncuran BPJS.

“Dari data yang kami peroleh, masyarakat yang terdata pada Jamkesmas tidak masuk pada BPJS. Setelah mereka mendaftar BPJS, mereka harus



Anggota Komisi IX DPR Muhammad Iqbal.

membayar,” katanya.

Selain evaluasi, DPR RI dan Kementerian Kesehatan akan mencari solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi BPJS.

“Solusi yang didapat ini nantinya bisa menyempurnakan BPJS, sehingga program jaminan kesehatan ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat kecil untuk pelayanan kesehatan lebih baik,” katanya.

Sebelumnya, tambah dia, Komisi IX DPR RI mengusulkan agar peserta jaminan kesehatan ini di data ulang oleh BPJS, karena masih ditemukan masyarakat miskin yang tidak terdaftar jaminan kesehatan.

Menurut dia, BPJS prinsipnya gotong royong dengan cara subsidi silang. Bagi masyarakat mampu mensubsidi masyarakat yang tidak mampu.

Saat ini, BPJS dalam kondisi transisi dengan Askes, karena BPJS ini baru diluncurkan pada 1 Januari 2014. "Saya berharap setelah enam bulan BPJS ini jalan, maka Komisi IX akan duduk ber-

sama dengan Kementerian Kesehatan untuk evaluasi BPJS ini," katanya.

Harapan yang sama dilontarkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Alwalindo Aulia Taswin supaya DPR mengevaluasi kembali program BPJS ini. "Kemenkes sudah bilang 6 bulan sekali, nanti bulan Juni disiapkan tim-timnya. Sebetulnya bukan Kemenkes, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJKN) bersama-sama melakukan evaluasi," katanya.

Perlunya evaluasi adalah, BPJS yang baru berjalan 3 bulan ini mesti ada yang bolong-bolong, karena itu supaya di-

sempurnakan, sehingga target tahun 2019 bisa tercapai. Kalau tahun 2014 ini sampai terseok-seok, padahal mestinya sudah mulai tahun lalu, maka bisa gagal.

"Namun dengan adanya niat baik para birokrasi dan provider, saya yakin akan menambah RS untuk berbondong-bondong ingin membuat MOU-kerjasama. Namun kalau masih seperti ini membuat RS untuk berpikir. Dulu KJS saja, ketika dicanangkan banyak yang keluar, pertama yang keluar 12 RS. Lalu dijelaskan sama Jokowi, baru mau kerja sama menjalankan program KJS," imbuh Taswin. (mp). foto: odjie/parle/iw.

## Swasembada Garam Tahun 2015 Sulit Tercapai



Petani Garam.

Program pemerintah untuk swasembada garam 2015 tampaknya sulit tercapai, mengingat hingga tahun 2014 ini saja, Indonesia masih mengimpor 50% kebutuhan garam nasional. Swasembada itu meliputi garam konsumsi dan garam industri.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo, Senin (24/3). Politisi Golkar itu menjelaskan, untuk memenuhi produksi garam industri, Indonesia belum bisa memenuhinya, karena kadar NaCl-nya harus 97%. Nah, di Indonesia rata-rata di bawah 90%. Padahal, Indonesia memiliki 9 provinsi yang dijadikan sentra produksi garam. Tapi, tetap saja belum mampu memenuhi kualitas nomor 1 untuk industri. Ini tentu sangat ironis.

Sembilan provinsi itu adalah Aceh, Jabar, Jatim, Bali, NTT, NTB, Sulteng, dan Sulsel. Bila hanya swasembada untuk garam konsumsi, itu sudah tercapai. Siswono lalu membandingkannya dengan Australia yang hanya punya satu wilayah sentra produksi garam. Tapi, kapasitas produksinya bisa mencapai 10 juta ton dengan kadar NaCl yang tinggi pula.

Pemerintah Australia telah menetapkan wilayah yang ideal untuk produksi garamnya, yaitu wilayah yang curah hujannya tidak ada, pantaunya landai, dan tidak ada sungainya. "Jadi menurut saya, kita harus mencari wilayah-wilayah seperti di Australia itu untuk meningkatkan produksi garam. Jangan membiarkan petani bekerja dengan efisiensi yang rendah dan terletak di daerah yang curah hujan-

nya tinggi," terang Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR ini.

Di Indonesia, sambung Siswono, wilayah ideal untuk produksi garam adalah Madura (Jatim) dan NTT. Hanya saja akses teknologinya yang belum memadai. Sementara PT. Garam (dahulu PN. Garam) sejak dahulu tidak melakukan modernisasi produksi garam. Padahal, dahulu sempat diberi monopoli perdagangan garam dalam jangka waktu lama. PT. Garam sebagai satu-satunya BUMN yang memproduksi garam malah tidak melakukan tugasnya dengan baik.

"Harusnya PT. Garam mengembangkan kebutuhan garam yang tidak bisa diproduksi rakyat, yaitu garam industri. Ironisnya, impor garam kita mencapai Rp 900 miliar lebih. Hampir satu triliun rupiah," papar Siswono.

Sebetulnya, sempat ada program pemerintah untuk produksi garam ini, yaitu PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat). Hasilnya, pada 2012 sempat menghasilkan 2 juta ton garam. "Itu suatu prestasi yang baik. Tapi sekali lagi skala usahanya kecil-kecil. Petani garam itu bukan pengusaha yang sukses secara materil, karena hasilnya terbatas. Skalanya mesti diperbesar," harap Siswono. (mh) foto: istimewa/parle.

# Pimpinan Lembaga Negara Bahas Persiapan Pemilu

Belasan poin menjadi kesimpulan dalam Rapat Konsultasi antar Pimpinan Lembaga Negara jelang Pemilihan Umum 2014. Hadir dalam rapat ini yaitu Presiden RI beserta Wakilnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat beserta wakilnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Komisi Yudisial. Rapat konsultasi berlangsung di Gedung Nusantara V, Kamis (20/03).

“Pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden harus diyakini sebagai momentum penting Bangsa Indonesia untuk dapat mengembangkan kualitas demokrasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tentunya demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi yang hanya untuk pertumbuhan demokrasi semata, yakni demokrasi yang benar-benar lahir dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari semua, untuk semua,” jelas Ketua MPR Sidarto Danusbroto usai rapat.

Sejak era reformasi, tambah Sidarto, Indonesia telah berhasil melaksanakan tiga kali Pemilu. Terlepas dari berbagai kekurangan, secara umum Pemilu 1999 dan 2004 berlangsung relatif secara demokratis, termasuk pemilu 2009.

“Untuk itu, kita pantas berharap dan yakin, pemilu 2014 juga dapat dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang lebih baik lagi. Pemilu yang diharapkan tentunya pemilu yang sebagaimana dengan Pasal 22e UUD 1945, yakni pemilu yang demokratis, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Dengan demikian, dalam rangka menyongsong Pemilu 2014, baik pemilu legislatif, maupun pemilu presiden, oleh karena itu segala upaya hendaknya diarahkan untuk mewujudkan pemilu 2014 yang demokratis sebagaimana amanat konstitusi tersebut,” jelasnya lagi.



Pimpinan Lembaga Tinggi Negara.

Melalui pemilu, rakyat diberi ruang untuk menentukan pilihannya menentukan siapa wakil rakyatnya baik di lembaga legislatif maupun pemimpin nasionalnya untuk lima tahun ke depan.

“Kita semua tentu berharap dan berupaya agar tahapan-tahapan pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, sehingga pada saatnya nanti mereka calon legislatif maupun presiden dan wakil presiden dapat dipilih tepat waktu sesuai dengan agenda kenegaraan yang telah disepakati. Selain itu, pemilu bisa berjalan demokratis dan berkualitas serta bisa diterima semua pihak bisa lebih baik dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. Pemilu baru benar-benar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta aman,” harap Sidarto.

Berdasarkan hasil rapat, ada tiga-pihak yang berkepentingan untuk menentukan keberhasilan pemilu, yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. Penyelenggara pemilu diharapkan bisa bekerja secara maksimal, bersih dan amanah. Peserta pemilu diharuskan melakukan pendidikan politik, dan masyarakat berpartisipasi dalam menyalurkan su-

aranya pada pemungutan suara.

“Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan pada seluruh peserta pemilu agar tidak menerima sumbangan dari pihak-pihak asing termasuk penyalahgunaan APBN atau APBD untuk mendukung peserta pemilu. Mengingat pemilu merupakan arena kompetisi politik, maka sangat mungkin dalam penyelenggaraan pemilu nanti muncul perselisihan hasil pemilu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, terutama terkait dengan perolehan suara hasil pemilu yang ditetapkan KPU,” jelas Sidarto.

Penyelenggaraan pemilu legislatif maupun presiden tahun 2014, tambah Sidarto, harus berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku, dan harus ada penegakan hukum yang tegas, obyektif, dan transparan apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya.

“Dihimbau kepada seluruh masyarakat, untuk menggunakan hak pilihnya, agar pemilu berjalan dengan berkualitas dan demokratis, sehingga meminimalisir warga yang tidak menyalurkan suaranya pada saat pemungutan suara,” tutup Sidarto. (mh,sf) foto: andri/parle/iw.



Ketua DPR Marzuki Alie melantik Anggota PAW Rini Rahmadani (F-PG) dan RR. Ida Resmi Nurani (F-PDI Perjuangan), Selasa (25/3). Foto: Naefuodjie/Parle.



Penandatanganan kerjasama AIPA dengan Jerman disaksikan Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti dan anggota AIPA lainnya, Selasa (25/3). Foto: Eka Hindra/Parle.



Peserta Diklat Koperasi Pegawai Setjen DPR RI dan penyerahan sertifikat oleh Ketua Pengawas Djaka Dwi Winarko di Kopo, Sabtu (22/3), foto: Iky/Parle.

